

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Dakwah Islam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dakwah Islam oleh DMI Kalsel telah dikelola dengan mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling dan evaluasi*, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penguatan.

1. DMI Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan program dakwah Islam berdasarkan visi dan misi penguatan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Proses perencanaan dilakukan di tingkat provinsi dengan melibatkan pengurus inti dan bidang terkait. Program yang dirancang mencakup kegiatan sosial-keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan sarana dan prasarana masjid, serta kegiatan kemanusiaan. Penyusunan program juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan dan masukan dari pengurus daerah, meskipun belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis.

Dalam aspek pengorganisasian, DMI Kalsel menyusun struktur organisasi secara fungsional dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, khususnya pada bidang yang menangani kegiatan dakwah Islam berbasis

tindakan nyata. Setiap pengurus menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, DMI Kalsel menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, serta lembaga sosial lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pengelolaan sumber daya manusia, relawan, anggaran, dan logistik disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas kegiatan.

Pelaksanaan dakwah Islam diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata di lapangan, seperti bantuan sosial, pembinaan ekonomi umat, perbaikan fasilitas masjid, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, partisipatif, dan kontekstual sehingga program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Masyarakat terlibat secara aktif baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai mitra pelaksana. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi lintas lembaga, dan perbedaan kondisi wilayah, yang diatasi melalui penguatan komunikasi dan penyesuaian strategi pelaksanaan.

Fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui monitoring kegiatan, penyusunan laporan berkala, serta rapat evaluasi internal yang melibatkan pimpinan dan bidang terkait. Indikator keberhasilan program dakwah Islam ditentukan berdasarkan ketercapaian tujuan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak sosial yang dirasakan. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan program pada periode berikutnya, meskipun sistem evaluasi masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan terukur.

2. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan dakwah Islam oleh DMI Provinsi Kalimantan Selatan adalah adanya komitmen pengurus dalam menjalankan program dakwah yang bersifat nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, dukungan dari masjid-masjid di daerah, kerja sama dengan berbagai pihak, serta partisipasi masyarakat juga menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan kegiatan dakwah Islam. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki semangat pengabdian serta program-program sosial seperti bantuan kemasyarakatan, pendidikan, dan pemberdayaan umat turut memperkuat peran DMI dalam dakwah Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, DMI Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam mengembangkan program secara maksimal. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum meratanya kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan dakwah Islam. Faktor lain seperti koordinasi yang belum optimal dan keterbatasan waktu pengurus juga menjadi hambatan dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dakwah Islam yang dilakukan oleh DMI Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meskipun masih terdapat hambatan, dengan penguatan manajemen, peningkatan sumber daya, serta kerja sama yang lebih luas, pelaksanaan dakwah Islam di masa depan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, dibutuhkan langkah-langkah yang terencana untuk memperbaiki pengelolaan organisasi agar lebih fleksibel dan memberi manfaat yang nyata. Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada fungsi manajemen POAC:

### 1. Perencanaan(*Planning*)

DMI Provinsi Kalimantan Selatan disarankan untuk memperkuat proses perencanaan dakwah bil-hal dengan menerapkan perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Kajian kebutuhan (*need assessment*) hendaknya dilakukan secara lebih sistematis melalui pengumpulan data lapangan, diskusi dengan pengurus daerah, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pengelola masjid. Selain itu, hasil kajian tersebut perlu didokumentasikan dalam bentuk dokumen perencanaan yang tertulis dan terstruktur agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan program serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Perencanaan yang matang dan terdokumentasi dengan baik juga akan membantu DMI Kalsel dalam menetapkan prioritas program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menjamin keberlanjutan dakwah Islam dalam jangka panjang.

### 2. Pengorganisasian(*Organizing*)

Dalam aspek pengorganisasian, DMI Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus mengoptimalkan peran struktur organisasi yang telah ada dengan memperjelas mekanisme koordinasi antarbidang, khususnya bidang yang menangani dakwah, sosial, dan pemberdayaan umat. Pembagian tugas dan wewenang

hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan standar kerja dan alur koordinasi yang jelas. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus dan relawan perlu menjadi perhatian utama melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan. DMI Kalsel juga disarankan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, ormas Islam, lembaga pendidikan, serta sektor swasta agar pelaksanaan dakwah bil-hal dapat didukung oleh sumber daya dan keahlian yang lebih beragam.

### 3. Pelaksanaan(Actuating)

Pada tahap pelaksanaan, DMI Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat terus mengembangkan program dakwah Islam yang bersifat inovatif, kontekstual, dan berbasis potensi lokal masyarakat. Pelaksanaan dakwah Islam tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sesaat, tetapi diarahkan pada upaya pemberdayaan umat yang berkelanjutan, seperti penguatan ekonomi masjid, pembinaan keterampilan masyarakat, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial keagamaan. Pendekatan partisipatif perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dakwah, tetapi juga menjadi subjek dan mitra strategis dalam pelaksanaan dakwah Islam, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.

### 4. Pengawasan dan Evaluasi (Controlling & Evaluasi)

DMI Provinsi Kalimantan Selatan disarankan untuk memperkuat sistem

monitoring dan evaluasi dengan menyusun indikator keberhasilan program yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Proses pengawasan tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi juga secara berkala selama pelaksanaan program berlangsung. Evaluasi hendaknya melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus, pelaksana lapangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat, agar diperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif. Hasil evaluasi perlu didokumentasikan secara sistematis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan strategi, serta pengembangan program dakwah Islam di masa mendatang, sehingga tercipta siklus manajemen dakwah yang berkelanjutan dan adaptif.

#### 5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian manajemen dakwah Islam dengan cakupan wilayah yang lebih luas, seperti pada tingkat kabupaten/kota atau dengan pendekatan komparatif antar lembaga dakwah. Selain itu, penggunaan metode penelitian kuantitatif atau *mixed methods* dapat dipertimbangkan untuk mengukur secara lebih objektif dampak dakwah Islam terhadap pemberdayaan umat. Kajian lanjutan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan manajemen dakwah serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan dakwah Islam di berbagai daerah